

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA DI PAKUNCEN

Ferbiansyah Yona Alfianto

Program Studi S1 Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
Ferbiansyahalfianto16040564005@mhs.unesa.ac.id

Agus Machfud Fauzi

Program Studi S1 Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
agusmfauzi@unesa.ac.id

ABSTRAK

Potensi wisata desa Pakuncen kauman memiliki daya tarik tersendiri. Potensi tersebut yaitu adanya wisata religi Makam Tumenggung Kopek yang berasal dari Kesultanan Yogyakarta dan adanya agenda rutinan kirap budaya. Wisata religi tersebut merupakan bukti peninggalan sejarah bernuansa islam dan bentuk penghormatan masyarakat Kauman terhadap penyebar ajaran islam di Desa Kauman. Sedangkan agenda rutin tradisi kirap budaya merupakan bukti peninggalan tradisi Jawa peninggalan kerajaan Mataram Kuno. Berkembangnya wisata religi merupakan visi dan misi utama Pemerintah Desa Pakuncen. Dari adanya pemaparan diatas maka tujuan penelitian yaitu mengidentifikasi peran pemerintah desa dalam pengembangan potensi wisata di Desa Pakuncen Kauman. Penelitian ini diangkat dengan menggunakan teori struktural fungsional dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dan menggunakan metode analisis Miles and Hubermans untuk analisis datanya. Hasil penelitian ini yaitu: 1) Integrasi antar pemerintah dan masyarakat yaitu dengan berfokus memunculkan ciri khas yang ada di Desa Pakuncen; 2) Faktor penghambat yaitu dari segi ekonomi atau pendanaan dan faktor pendukung yaitu adanya *feedback* baik berupa dukungan dari masyarakat tentang rencana hingga pembangunan Desa Wisata Religi ini; dan 3) Pemerintah harus segera meresmikan legalitas tempat wisata religi bukan hanya secara adat namun juga secara hukum.

Kata Kunci : Desa Wisata, Religi, Peran Pemerintah

ABSTRACT

The tourism potential in Pakuncen Kauman village has its own charm. This potential is the religious tourism of the Tumenggung Kopek Tomb which originated from the Yogyakarta Sultanate and the existence of a culture agenda. This religious tourism is evidence of historical heritage with Islamic nuances and a form of respect for the Kauman community for the spreaders of Islamic teachings in Kauman village. Meanwhile, the routine agenda of the cultural kirap tradition is evidence of the legacy of the Javanese tradition, the legacy of the ancient Mataram kingdom. The development of religious tourism is the main vision and mission of the Pakuncen Village Government. From the explanation above, the aim of the research is to identify the role of the village government in developing tourism potential in Pakuncen Kauman Village. This research was appointed using structural functional theory using descriptive qualitative methods and using Miles and Hubermans analysis method for data analysis. The result of this study are: 1) Integration between government and society, namely by focusing on bringing out the characteristics that exist in Pakuncen village; 2)

Inhibiting factors, namely in terms of economy or funding and supporting factors, namely the existence of good feedback in the form of support from the community regarding plans to the development of this religious tourism village; and 3) The government must immediately formalize the legality of religious tourism places, not only by custom but also legally.

Keywords : Tourism Village, Religious, Role of Government.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara berkembang dengan sektor pariwisata yang sedang berkembang. Negara Indonesia merupakan salah satu Negara yang kaya akan sumber daya alam dan kebudayaan yang beragam sehingga sangat berpotensi sebagai tempat wisata (Gunawan, 2016). Pariwisata merupakan sebuah perjalanan yang dilakukan seseorang baik itu dengan tujuan bisnis, kesenangan atau pendidikan dimana tempat yang dikunjungi beraneka ragam serta perjalanannya sudah direncanakan (SR, Sari & E, 2005). Pariwisata memiliki banyak manfaat dari adanya suatu tempat wisata yaitu suatu rangkaian proses pembangunan, yang menyangkut dari segi sosial, ekonomi dan politik (Arliman, 2019). Pembangunan akan dapat terlihat nyata apabila terdukung dari segi fasilitasnya yaitu adanya revitalisasi dari segi aspek sosial, ekonomi dan pembangunan (Fauzi et al., 2020). Pariwisata yang memiliki potensi yang menjanjikan sering terkendala dari segi promosi yang rendah, sehingga menyebabkan wisata tidak berkembang

secara maksimal (Primadany, 2013). Kurangnya perhatian serta keseriusan dari berbagai tokoh dan organisasi menjadi penyebab sulitnya pengembangan suatu wisata.

Jawa Timur memiliki beberapa kabupaten yang memiliki daya tarik khususnya dari sektor wisatanya, salah satunya yaitu Kab Nganjuk. Di Nganjuk terdapat salah satu desa wisata religi yaitu Desa Pakuncen. Desa Pakuncen merupakan kawasan perdikan (bebas dari pajak) dari kesultanan Yogyakarta. Desa ini memiliki nama lain yaitu Kauman yang berarti kawasan menimba ilmu ajaran agama islam. Desa Pakuncen merupakan kawasan penyebaran pendidikan Islam di Jawa pada saat sebelum kabupaten Nganjuk terbentuk tepatnya saat masa dakwah Kyai Nur Jalipah yaitu santri dari Sunan Drajat.

Desa Kauman ini terus berkembang dan semakin ramai masyarakatnya , sehingga mengundang serombongan Kesultanan dari Jojga Mataram, yang dipimpin Raden Tumenggung Purwodiningrat atau disebut dengan

Tumenggung Kopek dengan tujuan mengadakan pendekatan dengan Kiai Nurjalipah. Raden Purwodiningrat sendiri datang dengan tujuan untuk mendirikan sebuah wilayah pemerintahan yang letaknya dekat sungai Brantas dengan mengajak kerja sama dengan Kiai Nurjalipah tadi. Setelah ada kesepakatan dari beliau akhirnya berdirilah sebuah Kawedanan yang disebut Kawedanan Posono, atau sekarang pindah ke selatan dengan nama Kertosono. Kawedanan Posono di Pakuncen ini dibawah pimpinan dari kesultanan Jogja. Setelah berdirinya Posono ini tadi, tumenggung atau wedanan pertamanya adalah Kanjeng Raden Tumenggung Purwodiningrat ini. Raden Tumenggung Purwodiningrat ini menjabat sebagai bupati disini tidak tercatat waktunya karena memang belum ada bukti tertulis yang pasti. Kemudian setelah lama menjabat, permaisuri atau istri dari R T Purwodiningrat ini wafat, dan dimakamkan dibelakang masjid yang didirikan Kiai Nurjalipah ini. Kemudian Kiai Nurjalipah, Tumenggung Purwodiningrat, dan Kasultanan dari Jogja mengadakan perjanjian bahwa tanah Pakuncen ini dibebaskan pajak, atau sebagai tanah Perdikan. Hal ini terjadi karena tanah ini digunakan sebagai makam kerabat dari kasultanan Jogja tadi.

Sejarah makam ini yang dianggap memiliki nilai magis dan keramat masyarakat disekitarnya. Hal ini banyak membuat banyak orang datang untuk berziarah dan berdoa ke makam. Para pendatang yang berdoa tidak hanya warga sekitar saja, namun juga banyak pendatang dari jauh untuk melakukan wisata religi atau bisa disebut nyekar atau ziarah. Nyekar ini dalam arti Jawa yaitu berpergian ke suatu tempat seperti ke makam, masjid, relik-relik tokoh agama, raja, keluarga, dan para wali. Tujuan dari nyekar ini sendiri yaitu mengenang kebesaran Tuhan dan menyampaikan doa agar arwah Wali kubur diterima di sisi Allah (Fatimah, 2015). Jadi para pendatang yang berziarah kepada Tumenggung Kopek, yaitu untuk mendoakan seorang raja atau pemimpin pada masa dulunya agar diterima disisi Tuhan. Selain itu juga masih banyak pengunjung yang datang dengan motif lain untuk mengunjungi makam ini. Pengunjung yang datang pun ada dari berbagai kalangan, yaitu masyarakat biasa atau umum, pejabat daerah, dan siswa pelajar sekolah yang ingin melakukan studi wisata.

Seiring berjalannya waktu dan modernitas, ciri khas yang dimiliki desa Pakuncen tersebut memberikan daya tarik tersendiri oleh pemerintah desa Pakuncen

beserta beberapa lembaga lokal lainnya karena jumlah peziarah yang semakin meningkat. Pemerintah dan lembaga lokal lainnya bersepakat untuk membentuk desa wisata yang berbasis religi. Menurut pemerintah desa hal tersebut dilakukan untuk menjaga identitas *Kauman* sebagai bentuk upaya dalam pembangunan desa. Kerjasama secara terus-menerus dilakukan antara beberapa pihak yaitu dari pemerintah desa Pakuncen, yayasan Al-Qomar, Lembaga Adat Tumenggung Kopek, dan Masyarakat yang ada di desa Pakuncen.

Penelitian yang pertama berjudul “*A Development Plan For Tourism Potentials In Coastal Area OF Ujungnegoro, Batang Regency*” Suzanna Ratih dan Edy Darmawan (2005). Daerah Ujungnegoro yang memiliki potensi yang besar di sumber daya laut, perbukitan, dan daerah perkebunan. Tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu menganalisis dan mengidentifikasi mengenai strategi tentang perencanaan yang tepat untuk mengenalkan dan mempromosikan daerah pariwisata di Indonesia, khususnya di Ujungnegoro. Dengan tujuan untuk meningkatkan daerah perekonomian diwilayah sekitarnya, maka dibutuhkan kebijakan yang tepat dari pemerintah. Hasil dari penelitin ini sendiri, saat ini pemerintah menghadapi masalah dalam

yang menghambat pengembangan daerah ini, yaitu modal yang terbatas untuk keperluan pembangunan, tidaknya infrastruktur dan yang terakhir bantuan pemerintah yang tidak memadai dalam penganggaran dan bantuan teknis. Penelitian kedua Strategi Pengembangan Objek Daya Tarik Wisata Religi dengan Studi Kasus di Makam Mbah Mudzakir Sayung Demak” Siti Fatimah (2015). Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui berapa banyak sumber daya yang diperlukan dan strategi yang tepat untuk pengembangan serta faktor apasaja yang dapat mempengaruhi. Hasil penelitian ini bisa dikaterogrikan cukup baik, baik dari SDA dan SDM. Pengembangan wisata meliputi sarana dan prasana, pemasaran, serta kesenian dan kebudayaan. Selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan yaitu masyarakat, pemerintah desa, dan Dinas. Terdapat faktor yang dapat menghambat majunya tempat wisata yaitu kurang maksimalnya suatu promosi agar dikenal masyarkat. Penelitian ketiga berjudul Pengelolaan Wisata Religi Makan Mbah Hasan Munadi dan Hasan Dipuro di Nyatnyono Kabupaten Semarang Perspektif Sapta Pesona” Alvian Sai (2018). Fokus penelitan ini yaitu pada tempat wisata dengan perspektif sapta pesona serta faktor pendukung dan penghambat dalam mengelola makam di

Nyatnyono Kabupaten Semarang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil yang di dapatkan dari penelitian ini yaitu makam di Nyatnyono telah dikelola secara profesional dan menjadi salah satu tempat wisata religi dengan 7 kriteria Sapta Pesona yaitu: 1. Tertib, 2. Aman, 3. Indah, 4. Sejuk, 5. Bersih, 6. Ramah, dan 7. Kenangan. Beberapa faktor yang menjadi pendukung yaitu cara pengelolaan dengan cara berupaya memberikan fasilitas dan pendukung yang diperlukan peziarah. Sedangkan hambatannya yaitu keterbatasan pelayanan yang di dapat peziarah dan kurangnya dukungan dari pemerintah. Terdapat pula keterbatasan pengelola yaitu seperti masih kurangnya tenaga profesional dan kurangnya kontribusi pengelola yayasan Makam Nyatnyono untuk pengembangan wisata religi. Penelitian keempat Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Kawasan Desa Wisata pada Kampung Bintang Bekapur Desa Bintang Buyu Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang" Ahmad Zainul Arifin (2017) Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui peran pemerintah daerah dalam Pengembangan Kawasan Desa Wisata pada Kampung Bintang Bekapur Desa Bintang Buyu Kecamatan Teluk Bintang Kabupaten Bintang. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu

deskriptif kualitatif. Pengembangan desa wisata pada kampung Bintang belum berjalan optimal, hal ini dikarenakan sumber daya dinas pariwisata masih kurang memadai. Hal ini berdampak pada pengetahuan masyarakat tentang pariwisata yang tidak tersalurkan dengan baik. Pemerintah Bintang dalam pelaksanaannya sudah mengawasi kegiatan pariwisata, memberikan fasilitas sarana prasarana, serta penyuluhan kepada masyarakat setempat namun belum optimal.

Berdasarkan penjelasan diatas maka tujuan penelitian yaitu:

1. Mengidentifikasi potensi wisata religi di Desa Pakuncen.
2. Mengetahui masalah-masalah yang menjadi faktor penghambat dan pendorong dalam melakukan pengembangan Desa Pakuncen sebagai wisata religi.
3. Untuk Menganalisis bentuk-bentuk kebijakan yang dilakukan pemerintah desa dalam pengembangan desa Pakuncen sebagai wisata religi.

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan Deskriptif. Subjek dari penelitian yaitu Perangkat desa (Juru Kunci Desa dan Pemerintah Desa) yang terlibat dalam

pengembangan makam di desa Pakuncen. Studi ini menggunakan teknik analisis data Miles and Huberman yaitu suatu teknik analisis yang dilakukan secara interaktif dan dilakukan secara kesinambungan terus-menerus hingga data mencapai puncak kejenuhannya dalam metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik sampling yaitu teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi (kunjungan ke subjek penelitian), wawancara (menggunakan media rekaman), dokumentasi (mendokumentasikan rekaman), triangulasi (penggabungan hasil) (Sugiyono, 2018).

KAJIAN PUSTAKA

Teori Struktural Fungsional

Talcot Parsons merupakan seorang Sosiolog yang berasal dari Amerika, Parsons merupakan sosiolog kontemporer yang selalu menggunakan pendekatan fungsional dalam masyarakat, baik dari fungsi maupun prosesnya. Parsons mengungkapkan dalam teori struktural fungsional yaitu “suatu keyakinan yang optimis terhadap perubahan dan kelangsungan suatu sistem. Bagi yang hidup dalam sistem yang kelihatannya mencemaskan dan kemudian diikuti oleh pergantian dan perkembangan lebih lanjut maka optimisme teori Parsons dianggap

benar. Talcot Parson melahirkan teori fungsional tentang perubahan”. Parsons menganalogikan perubahan sosial dalam masyarakat seperti pertumbuhan pada makhluk hidup. Hal utama dalam pemikiran Parsons adalah proses diferensiasi. Menurut Parsons “masyarakat tersusun atas subsistem yang berbeda berdasarkan struktur dan fungsionalnya untuk masyarakat luas ketika masyarakat berubah, masyarakat tersebut akan tumbuh dengan kemampuan yang lebih baik dalam menanggulangi permasalahan hidupnya”. Jadi intinya Parson tergolong sosiolog yang optimis dalam memandang sebuah perubahan. Pada penelitian ini menggunakan teori struktural fungsionalis untuk menjawab tindakan perubahan dan perkembangan yang terjadi pada desa wisata Pakuncen.

Teori Struktural Fungsional Parsons membagi kedalam 4 imperatif sistem tindakan atau terkenal dengan nama AGIL yaitu :

1. *Adaptation* (Adaptasi)

Suatu sistem harus bisa mengatasi kebutuhan mendesak yang sifatnya eksternal. Sistem harus beradaptasi dengan lingkungan dari lingkungan dan mengadaptasikan lingkungan dengan kebutuhannya. Jadi ibarat makhluk hidup, kalau ingin tetap bertahan hidup disuatu lingkungan dia harus membiasakan diri dan

beradaptasi dengan lingkungannya walaupun lingkungannya tidak mendukung.

2. *Goal* (Pencapaian Tujuan)

Sistem harus dapat mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya. Artinya sistem harus memfokuskan pemikiran individu agar dapat membentuk kepribadian individu dalam mencapai tujuan.

3. *Integration* (Integrasi)

Sistem harus mengatur ketiga hubungan 3 bagian menjadi komponen, yaitu adaptation, goal dan latensi.

4. *Latensi* (Pemeliharaan Pola)

Pemeliharaan pola yaitu pada suatu sistem harus melengkapi, memelihara dan menjaga suatu motivasi individu dan pola budaya, agar individu menciptakan dan mempertahankan pola-pola tersebut.

Peran Pemerintah

Peranan Pemerintah adalah segala kegiatan atau usaha yang di dikoordinasikan, bersumber pada kedaulatan dan berlandaskan pada dasar negara, mengenai rakyat dan wilayah Negara, mengenai rakyat dan wilayah Negara demi terciptanya tujuan Negara (Haboddin, 2015). Peran pemerintah dinilai sangat penting dan hal ini dapat

menentukan tingkat kadar nasionalisme suatu Negara yang dapat berimbas pada sektor pembangunan (Fauzi, n.d.). Seperti variabel yang digunakan pada pengembangan potensi di desa Curug Kembar Ciamis menggunakan peran pemerintah selaku stabilisator, peran pemerintah selaku innovator, peran pemerintah selaku modernisator, peran pemerintah selaku pelopor, peran pemerintah sebagai pelaksana sendiri, dan dampak pengembangan, faktor pendukung dan penghambat wisata (Hidayat, 2020). Sedangkan variabel pada tempat wisata Bintang digunakan variabel peran pemerintah desa sebagai koordinator, fasilitator, stimulator (Arifin, 2017). Berikut adalah beberapa penjelasan dari variabel yang selanjutnya diuraikan dan menjadi pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Peran Pemerintah Desa Sebagai Stimulator

Pembangunan harus diselenggarakan sendiri oleh pemerintah, dengan memperhitungkan seluruh faktor yang berpengaruh dalam pembangunan. Peran pemerintah sebagai stimulator yaitu pemerintah harus dapat memberikan stimulasi dalam hal kerjasama untuk menjaga serta mengadakan kegiatan yang

berhubungan dengan jumlah pengunjung pada nantinya (Arifin, 2017). Peran Pemerintah Desa sebagai stabilisator

Peran pemerintah sebagai stabilisator yaitu menjaga stabilitas kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan (Hidayat, 2020).

2. Peran Pemerintah Desa sebagai innovator

Peran pemerintah sebagai innovator yaitu memandang peran pemerintah dari segi *rule model* yaitu menjadi sesuatu yang bisa di contoh dalam pembaharuan tata kelola kehidupan oleh masyarakat (Hidayat, 2020).

3. Peran Pemerintah Desa sebagai modernisator

Pemerintah desa secara implisit memiliki tanggungjawab membawa perubahan masyarakat ke arah kehidupan lebih baik dan modern di segala bidang dengan menggunakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah (Hidayat, 2020). Peran Pemerintah Desa sebagai pelopor

Pemerintah desa memainkan pelopor dalam berbagai kehidupan bermasyarakat dalam melaksanakan program-program sesuai dengan prinsip utama dalam mengembangkan konsep

pemberdayaan masyarakat (Hidayat, 2020). Peran Pemerintah Desa sebagai pelaksana sendiri

Pemerintah harus dapat menyelenggarakan sendiri dalam hal pembangunan dengan memperhitungkan seluruh faktor yang berpengaruh terhadap pembangunan. Pemerintah harus dapat mengendalikan faktor negatif yang cenderung dapat menjadi faktor penghambat dan mengidentifikasi faktor yang menjadi pendorong pembangunan sehingga menjadikan dampak yang optimal (Hidayat, 2020).

4. Peran Pemerintah Desa sebagai Koordinator

Peran pemerintah sebagai koordinator yaitu bahwa pemerintah harus dapat mengkoordinasikan atau mensosialisasikan tentang tempat wisata kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya promosi (Arifin, 2017).

5. Peran Pemerintah Desa sebagai fasilitator

Pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan perilaku di daerahnya. Peran ini dapat meliputi pengefisienan proses pembangunan, perbaikan

prosedur perencanaan dan penetapan peraturan (Arifin, 2017).

6. Faktor pendukung, penghambat, dan kebijakan

Peran pemerintah desa sangat dominan sebagai actor pembangunan yang akan memberikan ruh pada pembangunan wilayah dan pemberdayaan pada masyarakatnya, namun dalam implementasinya turut dipengaruhi oleh faktor pendukung (regulasi, peraturan pemerintah, proyeksi, potensi fisik dan non fisik) dan penghambat (belum adanya regulasi, persepsi masyarakat, daya dukung infrastruktur) (Hidayat, 2020).

Pengembangan Desa Wisata

Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru (Republik Indonesia, 2002). Pengembangan kawasan wisata merupakan bagian dari pemanfaatan jasa pengembangan sumberdaya alam dan pembangunan nasional. Tujuan yang diharapkan pelaku

pengembangan yaitu pengembangan dapat memberikan kontribusi terhadap perekonomian dalam arti luas serta dapat merangsang pembangunan di sektor-sektor lainnya (Supriana, 1997).

Pengembangan wisata meliputi pengembangan tempat wisata, sarana dan prasana, pemasaran, serta kesenian dan kebudayaan. Selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan yaitu masyarakat, pemerintah desa, dan dinas dengan menciptakan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan. Sedangkan faktor penghambat kurangnya promosi dari tempat wisata ini untuk dikenal masyarakat (Fatimah, 2015). Makam di Nyatnyono telah dikelola secara profesional dan menjadi salah satu tempat wisata religi dengan 7 kriteria Sapta Pesona yaitu: 1. Tertib, 2. Aman, 3. Indah, 4. Sejuk, 5. Bersih, 6. Ramah, dan 7. Kenangan. Terdapat beberapa faktor yang menjadi pendukung yaitu cara pengelolaan dengan cara berupaya mendukung dan memfasilitasi peziarah dalam berziarah kubur. Hambatan yang menjadi keterbatasan dalam melakukan pelayanan yaitu kurangnya dukungan dari pemerintah. Terdapat pula keterbatasan pengelola yaitu seperti masih kurangnya tenaga profesional serta kontribusi pengelola yayasan Makam Nyatnyono untuk pengembangan wisata religi (Sai,

2018). Pengembangan desa wisata belum dapat berjalan optimal dikarenakan adanya faktor dari sumber daya dinas pariwisata yang masih kurang memadai. Hal ini berdampak pada pengetahuan masyarakat tentang pariwisata yang tidak tersalurkan dengan baik. Pemerintah Bintan dalam pelaksanaannya sudah mengawasi kegiatan pariwisata, memberikan fasilitas sarana prasarana, serta penyuluhan kepada masyarakat setempat namun belum optimal (Arifin, 2017).

Desa wisata merupakan wilayah desa yang mempunyai sebuah keindahan untuk memberikan keindahan yang murni dari desa tersebut, baik dari segi kehidupan sosial budaya, aktifitas keseharian, arsitektur bangunan, dan struktur tata ruang desa menjadi sebuah potensi yang dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisata tersendiri. Misalkan: makanan dan minuman, atraksi, cinderamata, kebutuhan wisata lainnya, dan penginapan (Fandeli, 2002).

PEMBAHASAN

Potensi Desa Wisata Pakuncen

Berdasarkan hasil wawancara dan disaring kebenarannya maka di dapatkan beberapa hasil potensi desa Pakuncen yaitu:

1. Desa Pakuncen memiliki potensi religi islam berbaur dengan adat jawa dikarenakan terdapat bumi Pemakaman priyayi-priyayi Mataram dari Kesultanan Yogyakarta. Hal ini dianggap berbeda karena pemakamannya bernuansa islam Jawa tidak seperti wisata religi pada umumnya. Tidak hanya untuk sekedar mendoakan (berziarah) , namun peziarah juga sekaligus dapat belajar dan meluruskan tentang sejarah Jawa khususnya berdirinya desa Pakuncen. Desa Pakuncen sebagai wisata religi sudah terbentuk sejak Kyai Nurjalipah memimpin Pakuncen sebagai kepala desa yang merangkap sekaligus menjadi juru kunci. Namun pengembangannya baru difokuskan (diprioritaskan) pada tahun 2016 hingga sekarang. Terakhir di adakannya Musyawarah Desa (MUSDES) untuk perencanaan tahun 2021 dilaksanakan pada September 2020. Anggota yang menghadiri sosialisasi MUSDES tersebut yaitu dari beberapa unsur misalnya masyarakat miskin, unsur wanita, BPD, tokoh agama, tokoh pengerajin, dan lembaga kemasyarakatan.
2. Selain nuansa jawa terdapat potensi lain lain yaitu adanya agenda rutin kirap budaya seperti: Haul, Kirap pusaka, kirap budaya, Suroan, dan

agenda rutin sebelum adanya pencalonan eksekutif maupun legislatif.

***Adaptation* Pengembangan Desa Wisata Religi Pakuncen**

Pembangunan desa wisata ini dimulai sejak tahun 2016. Pada awal pengenalan desa wisata kepada masyarakat terjadi pro dan kontra tentang gagasan yang diusulkan untuk pengembangan desa wisata religi ini. Hal tersebut dikarenakan ketidakpahaman masyarakat tentang desa wisata itu. Namun, sekarang sudah dapat menerima dengan baik. Selanjutnya dibentuklah Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS). Kebutuhan yang utama sekarang ini yaitu dibutuhkannya perbaikan fasilitas pengunjung berupa perbaikan tempat parkir. Menurut teori Struktural Fungsional “Suatu sistem harus bisa mengatasi kebutuhan mendesak yang sifatnya eksternal. Sistem harus beradaptasi dengan lingkungan dari lingkungan dan mengadaptasikan lingkungan dengan kebutuhannya. Jadi ibarat makhluk hidup, kalau ingin tetap bertahan hidup disuatu lingkungan dia harus membiasakan diri dan beradaptasi dengan lingkungannya walaupun lingkungannya tidak mendukung”. Berdasarkan hasil dari pembahasan di atas, maka dapat diverifikasi bahwa pengembangan desa wisata religi di Desa

Pakuncen sudah sesuai dengan teori struktural fungsional yang mana masyarakat awalnya pro dan kontra dapat membiasakan diri dan beradaptasi dengan lingkungannya walaupun lingkungannya tidak mendukung. Namun, desa wisata masih belum mampu memenuhi kebutuhan eksternalnya sendiri yang mendesak yaitu pembuatan sarana prasarana bagi pengunjung yaitu tempat parkir. Setelah adanya penerimaan dari masyarakat, maka Dinas Pariwisata dan Kebudayaanlah yang melakukan pemaparan dan pengenalan desa wisata religi yang kemudian dikembangkan sendiri oleh masyarakat. *Adaptation* yang dilakukan masyarakat selanjutnya adalah adanya agenda yang diadakan masyarakat baik berupa fisik maupun non-fisik. Agenda berupa fisik yaitu adanya pembangunan-pembangunan, seperti: pembangunan pendopo, gapuro, warung-warung, dan pagar dengan nuansa Majapahit yang tujuannya untuk mempercantik desa. Agenda non-fisik yaitu adanya UMKM pemberdayaan masyarakat untuk membuat pernak-pernik atau makanan/kue khas Pakuncen atau pengenalan kebaya-kebaya yang bersifat klasik bukan modern.

***Goal* Pengembangan Desa Wisata Religi Pakuncen**

Pencapaian tujuan dalam penelitian ini yaitu wisata religi di Desa Pakuncen

dapat berkembang dengan pesat. Hal ini dibuktikan dari adanya upaya promosi/iklan yang dilakukan oleh pihak pemerintah. Iklan dilakukan melalui media sosial *Facebook*, Internet, IG, dan juga media massa Koran. Promosi yang dilakukan yaitu dengan cara memperkenalkan ke masyarakat luas tentang keunikan yang tentunya dapat membuat daya tarik tersendiri pada makam desa Pakuncen/makam Eyang Tumenggung Kopek. Misalnya adanya agenda Haul, Kirap, dan Suroan. Hal ini sejalan dengan visi dan misi Kepala Desa Pakuncen yaitu menjadikan desa Pakuncen sebagai wisata religi dengan jangka panjang 6 tahun atau rencana jangka panjang. Menurut Parsons “Sistem harus dapat mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya. Artinya sistem harus memfokuskan pemikiran individu agar dapat membentuk kepribadian individu dalam mencapai tujuan”. Adanya sistem yang telah dibuat/dirumuskan di MUSDES sehingga pengunjung mengalami kenaikan yaitu sebelum adanya Covid-19 perbulannya mencapai 500-600 orang. Sedangkan setelah adanya Covid-19 hanya mencapai 70-80 orang peziarah. Pengurangan peziarah dikarenakan kebijakan larangan berkunjung pada semua wisata yang dikeluarkan pemerintah pusat. Maka, tidak ada kebijakan apapun yang dapat

dilakukan oleh pemerintah desa karena hal ini bersifat nasional.

Latensi Pengembangan Desa Wisata Religi Pakuncen

Pengembangan potensi desa wisata diawali dengan adanya MUSRENBANGDES dengan pihak-pihak terkait (seluruh elemen yang hadir, perwakilan wanita, perwakilan rakyat miskin, pemerintah, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pengrajin, ketua rapat, dan BPD). Selanjutnya keputusan rapat ditandatangani oleh seluruh elemen yang hadir menyatakan bahwa adanya persetujuan dan agenda yang direncanakan legal/resmi ditetapkan namun belum dibentuk PERDES nya secara hukum. Secara legalitas adat atau secara makro sudah dibuat. Sedangkan untuk fasilitas penginapan di daerah wisata seperti hotel, Mess, villa bagi pengunjung masih belum tersedia. Kebijakan pemerintah sebagai bentuk dukungan dalam pengembangan desa wisata religi di Desa Pakuncen hanya berasal dari Pemerintah Daerah belum datang dari Pemerintah Provinsi. Namun secara moril pemerintah provinsi juga ikut mendukung salah satunya diadakannya pemberdayaan masyarakat. Contohnya: Seni Ukir, Seni Lukis. Menurut Parsons “Yaitu sistem harus melengkapi, memelihara dan menjaga suatu motivasi individu dan pola-pola budaya, agar individu menciptakan

dan mempertahankan pola-pola tersebut”. Berdasarkan teori Parsons pada penelitian ini bahwa harus ada peran dari pemerintah mulai dari pemerintah desa, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan hingga pemerintah pusat. Adanya dukungan dari peran pemerintah akan memberikan dampak yang signifikan dalam pengembangan tempat wisata religi di Desa Pakuncen. Bahwa dengan menjaga keunikan desa dan adanya dampingan dari pemerintah akan membantu memberikan stimulasi yang dapat memberikan pengetahuan tentang desa wisata religi untuk selanjutnya di kembangkan oleh masyarakat sendiri. Kegiatan baru atau rule model yang digagas oleh pemerintah yang dapat dicontoh oleh masyarakat yaitu pengenalan sejarah atau meluruskan sejarah yang telah berkembang tentang desa Pakuncen yang bertujuan mengenalkan desa wisata religi yang berbaur dengan adat Jawa.

Integration Pengembangan Desa Wisata Religi Pakuncen

“Sistem harus mengatur ketiga hubungan 3 bagian menjadi komponen, yaitu adaption, goal dan latensi”. Adanya integrasi antara peran pemerintah desa yang berkolaborasi dengan pemerintah Daerah maupun Provinsi dengan promosi/iklan dan perbaikan sarana prasarana yang mendukung sebagai alat

mencapai tujuan yaitu pengembangan. Adanya pengembangan diharapkan pada akhirnya dapat memberikan kontribusi secara material berupa Retribusi seperti Harga Tiket Masuk (HTM) dan parkir yang dapat memberikan masukan pada Dana Desa yang tentunya akan memberikan dampak baik pada ekonomi Desa.

Faktor Penghambat

Terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat pengembangan tempat wisata religi ini yaitu:

1. Masih belum adanya tarikan retribusi Harga Tiket Masuk (HTM) maupun parkir. Hal inilah yang menjadi penyebab wisata ini tidak dapat berkembang secara maksimal. Sedangkan pemerintah memiliki program pembuatan sarana prasarana berupa perbaikan tempat parkir bagi pengunjung. Karena terkendala biaya yang hanya mengandalkan dari swadaya dana desa, maka rencana tersebut masih belum bisa terlaksana. Belum adanya fasilitas penginapan di daerah wisata seperti hotel, Mess, villa bagi pengunjung, padahal untuk pengunjung yang berasal dari luar kota menginap di daerah tempat wisata merupakan hal yang efisien.

Faktor Pendorong

Terdapat beberapa faktor pendorong/pendukung pengembangan wisata religi di desa Pakuncen yaitu:

1. Adanya dukungan dari Dinas Pariwisata, seluruh elemen masyarakat, pondok pesantren Sunan Kalijaga, pemerintah desa, pemerintah daerah, dan pemerintah provinsi. Dukungan dari Dinas Pariwisata berupa pendampingan, dukungan dari semua elemen masyarakat dan pondok pesantren berupa tenaga ikut bergotong royong dalam pembangunan desa dan materiil untuk konsumsi kerjabakti, dukungan pemerintah desa dan kabupaten berupa moril dan materiil, dan dukungan kabupaten dan provinsi hanya dukungan berupa moril yaitu pemberdayaan masyarakat melalui: pelatihan membuat kue khas daerah Pakuncen, membuat pernak pernik, seni ukir, dan seni lukis.
2. Banyaknya antusias pengunjung peziarah yang mencapai kisaran 500-600 orang pengunjung setiap bulannya (sebelum adanya Covid-19), 70-80 orang peziarah (setelah adanya Covid-19).
3. Adanya pengawas yang mengawasi kegiatan wisata yang berasal dari POKDARWIS untuk mencapai tujuan

(*goal*) dari segi keamanan dan kenyamanan peziarah.

Kebijakan Pemerintah Desa Pakuncen

Dalam Pengembangan Desa Wisata

Adapun kebijakan pemerintah desa Pakuncen untuk pengembangan desa yaitu:

1. Program kerja pengembangan desa Pakuncen sebagai wisata religi terangkum di Visi dan Misi kepala desa.
2. Pemerintah desa berusaha dalam hal mengiklankan wisata religi desa Pakuncen dengan tujuan memperluas informasi tentang wisata religi yang ada di Desa Pakuncen. Iklan dilakukan melalui media sosial Facebook, Internet, Instagram, dan juga media massa Koran.
3. Keputusan adanya pembangunan wisata desa selalu melalui rapat musyawarah mulai dari MUSRENBANGDES, MUSDES lalu diusulkan ke Pemerintah. Hasil rapat lalu di tandatangi oleh seluruh elemen yang hadir, ketua rapat, dan BPD. Berdasarkan legalitas operasinya dari desa sementara belum di buat Peraturan Desa (PERDES) yang mengatur secara hukum. Namun, secara legalitas adat atau secara makro berdasarkan keputusan bersama sudah

legal dan telah terbentuk adanya POKDARWIS.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian yaitu:

Terdapat dua potensi di Desa Pakuncen yaitu potensi wisata religi di Makam Tumenggung Kopek dan adanya agenda rutin (kirap budaya) yaitu seperti Haul, Kirap pusaka, kirap budaya, Suroan, ritual sebelum pencalonan legislatif. Terdapat faktor penghambat tempat wisata yaitu masih belum adanya tarikan retribusi Harga Tiket Masuk (HTM) maupun parkir dan belum terdapat fasilitas penginapan di daerah wisata seperti hotel, Mess, villa bagi pengunjung, padahal untuk pengunjung yang berasal dari luar kota menginap di daerah tempat wisata merupakan hal yang efisien dalam mendukung perputaran perekonomian. Sedangkan faktor pendukung pengembangan desa wisata religi pakuncen yaitu adanya dukungan dari seluruh elemen yaitu Dinas Pariwisata, elemen masyarakat, BPD, pemerintah desa, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan adanya antusias pengunjung peziarah dengan kuantitas yang semakin naik. Pemerintah juga menyediakan pengawas yang ikut berperan untuk mencapai tujuan pengembangan desa wisata Pakuncen. Disamping

pengembangan yang sedang menjadi fokus pemerintah, pemerintah harus segera meresmikan legalitas dengan membuat PERDES Tempat Wisata secara hukum. Adanya legalitas peresmian menambah tingkat keyakinan masyarakat tentang wisata tersebut dengan iklan yang dapat dibuat selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, A. Z. (2017). Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Kawasan Desa Wisata Pada Kampung Bintan Bekapur Desa Bintan Buyu Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Bintan. *Universitas Maritim Raja Ali Haji: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*.
- Arliman, L. (2019). *Role Investment in Development Policy of Tourism Economics in West Sumatera Province*. 20 (2), 273–294.
- Fandeli, C. (2002). *Perencanaan Kepariwisata Alam*. Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada.
- Fatimah, S. (2015). Strategi Pengembangan Objek Daya Tarik Wisata Religi (Studi Kasus di Makam Mbah Mudzakir Sayung Demak). *Universitas Islam Negeri Wolisongo Semarang*.
- Fauzi, A. M. (n.d.). *Nasionalisme untuk*

- Membangun Negeri NKRI.*
- Fauzi, A. M., Sujianti, N., Baskara, T. S., Damayanti, B. A., Noormala, N., Sujianti, N., Baskara, T. S., Damayanti, B. A., & Dharmastuti, N. N. (2020). *Persepsi masyarakat mengenai pembangunan tpa benowo oleh pemerintah kota surabaya.* 4(1), 103–118.
<https://doi.org/10.21776/ub.sosiologi.jkrb.2020.004.1.07>
- Gunawan, A. (2016). Analisis Pengembangan Pariwisata Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat. *Administrasi Bisnis*, 32 (1).
- Haboddin, M. (2015). *Pengantar Ilmu Pemerintahan.* Universitas Brawijaya Press. <http://www.ubpress.ub.ac.id>
- Hidayat, E. S. (2020). Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Objek Wisata Curug Kembar Desa Raksabaya. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* E-ISSN 2614-2945, 7(2).
- Nurcholis, H. (2005). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah.* PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Primadany, S. R. (2013). Analisis Strategi Pengembangan Pariwisata Daerah (Studi Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Kabupaten Nganjuk). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(4), 135–143.
- Republik Indonesia, P. (2002). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 Tanggal 29 Juli 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.*
- Sai, A. (2018). *Pengelolaan Wisata Religi Makan Mbah Hasan Munadi dan Hasan Dipuro di Nyatnyono Kabupaten Semarang Perspektif Sapta Pesona.*
- SR, Sari & E, D. (2005). A Development Plan for Tourism Potentials in Coastal Area of Ujungnegoro. *Journal of Coastol Development*, 9 (1), 43–51.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (28th ed.). cv. alfabeta.
- Supriana. (1997). Pengembangan Pariwisata Alam Dikawasan Pelestarian Alam, Prosiding Pelatihan dan Lokakarya Perencanaan Pariwisata Berlanjutan. *Bandung.*